

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

Baubaupost.com

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Jumat
26 Januari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pj Walikota Dr Muh Rasman Tegaskan Potensi HKI Baubau Diserahkan ke Kemenkum dan HAM



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan peundang-undangan di bidang HKI seperti Undang-Undang hak cipta, desain produk oleh Pemerintah Kota Baubau saat ini tengah diperjuangkan.

Empat Daerah di Kepton Tanda Tangani NPHD Bersama
Danrem 143 Halu Oleo untuk Penyelenggaraan Pilkada



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Daerah yang masuk dalam cakupan wilayah Kepulauan

Buton (Kepton) yakni Kota Baubau Kabupaten Buton. Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan menan-

datangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk peny-

Lanjutkan ke Hal: 7

Dinas Perikanan Baubau Target
PAD Budidaya Udang Vaneme
Sebesar Rp 270 Juta



Sekdin Dinas Perikanan Yusnia Alimin

Laporan: Alyakin

BAUBAU, BP - Dinas perikanan Kota Baubau (Diskan), Provisi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan, Yulia Widiarti menargetkan pendapatan Aset

Daerah (PAD) dari Budi-
daya udang vaneme pada
tahun 2024 sebesar Rp
270 juta rupiah.

Kepala Dinas Perikan-
an melalui Sekertaris Di-
nas Perikanan, Yusniah

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Segera Lakukan
Evaluasi Kinerja OPD



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si segera melakukan evaluasi kinerja. Bah-
kan, orang nomor satu di Kota Baubau ini saat

rapat evaluasi hasil ca-
paian LPPD Kota Bau-
bau sekaligus membahas
penyusunan LPPD Kota
Baubau tahun 2023 Sela-
sa (23/1/2024) sudah me-
nyampaikan kepada Ke-
pala Inspektorat La Ode

Aswad, S.Sos, M.Si un-
tuk segera menyiapkan
bahan guna melakukan
evaluasi kinerja di bu-
lan Januari 2024 sesuai
dengan amanah di Un-
dang-Undang perenca-

Lanjutkan ke Hal: 7



SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Pj Walikota Dr Muh Rasman Tegaskan Potensi HKI Baubau Diserahkan ke Kemenkum dan HAM

HKI Kota Baubau ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Sultra di ruang kerja Wali Kota Baubau Selasa (23/1/2024).

Kepala Balitbang Kota Baubau Drs Rahmad Tuta, M.Si yang mendampingi Pj Wali Kota Baubau bersama Asisten II Setda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si dan Kadis Perindag Kota Baubau H La Ode Ali Hasan, SE, M.Si saat penyerahan HKI Kota Baubau mengungkapkan, didalam pertemuan dengan Kanwil Kemenkum dan HAM Sultra, Dr Muh Rasman Manafi menyerahkan laporan akhir identifikasi, inventarisasi dan pemetaan HKI Kota Baubau.

Dari hasil penelitian, potensi HKI Kota Baubau yang berbasis komunal ada tari tradisional diantaranya tari Galangi, tari Linda, tari Bosu, tari Balumpa, tari Kalegoa dan yang lainnya. Kemudian, ada pula cerita rakyat yang dahulu berada dalam masa pemerintahan Kesultanan Buton. Misalnya cerita rakyat Wandiu-Ndiu, Landoke-Ndoke,, Sawerigadi, Daun Kepala yang menjadi ikan dan yang lainnya.

Disamping itu, ada juga yang berupa musik tradisional seperti gambusu, gandana maludhu, Latotou dan yang lainnya. Selain itu, ada juga ritual adat seperti peka kande kande, pakandeanana ana maelu, haro-

ana maludhu, haro-ana rajabu dan berbagai macamnya.

Dalam potensi HKI Kota Baubau selanjutnya adalah bela diri tradisional diantaranya isi dan rahasia dari umara, galanga, mangaru, silat sangkapura dan lainnya. Ada juga obat-obatan tradisional yakni lancau patapulu giuna, sambiroto, kabote bote, pencabeling dan masih banyak lagi obat-obatan yang punya potensi.

Tak ketinggalan pula kain tradisional juga masuk dalam potensi HKI Kota Baubau seperti ada beberapa jenis seperti bhia kalau, bhia kolau. Demikian pula dengan kuliner tradisional masuk juga dalam potensi HKI seperti

Bae Mambaka, Bae Inasu, Salarai, Luluta, Katupa, Lapa, burasa, jampena wolio, jampena wata dan sebagainya.

Terakhir ada juga desain produk. Semua ini termuat didalam potensi HKI yang diserahkan Pj Wali Kota Baubau terhadap identifikasi, inventarisasi dan pemetaan HKI Kota Baubau.

“Minimal saat ini Pemkot Baubau sudah menyatakan banyak potensi HKI yang dimiliki Kota Baubau berdasarkan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan HKI hasil kajian Balitbang Kota Baubau tahun 2019. Ini andaikan pagar kita duluan sudah memagari bahwa produk-produk ini sebenarnya ada di Kota Baubau,” ujarnya. (*)

Empat Daerah di Kepton Tanda Tangani NPHD Bersama Danrem 143 Halu Oleo untuk Penyelenggaraan Pilkada



Pj Walikota Baubau Dr Muhammad Rasman Manafi

elenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Wali Kota bersama Komandan Korem (Danrem) 143 Halu Oleo Brigjend Infanteri Ayub Akbar di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata (23/1/2024).

Penandatanganan NPHD tersebut turut disaksikan Forkompinda, KPU dan Bawaslu

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengungkapkan,

kesempatan penandatanganan NPHD sudah dinantikan sekitar 1 bulan lamanya, setelah sebelumnya melakukan pembahasan tentang NPHD, menandatangani pada akhir tahun lalu bersama Bawaslu, KPU. Kemudian, melakukan pembahasan lebih lanjut bersama TNI dan Polri.

“Alhamdulillah dari TNI kita selenggarakan hari ini bersama dengan perwakilan Bupati

Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan. Ini menjadi salah langkah percepatan untuk melaksanakan penandatanganan di satu tempat, dan untuk Bawaslu, KPU itu dilaksanakan di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini memberikan apresiasi terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus tulusnya kepada Danrem 143

Halu Ole Brigjend Infanteri Ayub Akbar atas kesempatannya berkunjung ke Kota Baubau sekaligus menyelenggarakan penandatanganan NPHD.

Dr Muh Rasman menjelaskan, Kota Baubau ini merupakan wilayah Ibu Kota yang sejak dulu sudah disebut sebagai Kota. Sejak menjadi Sulawesi Tenggara dari bagian dari Kabupaten Sulawesi Tenggara yang ma-

Dinas Perikanan Baubau Target PAD Budidaya Udang Vaneme Sebesar Rp 270 Juta

Alimin mengatakan, pihaknya optimis PAD dari budidaya udang vaneme meningkat di tahun 2024.

“Budidaya udang vaneme dimulai pada tahun 2023, dan tahun itu sudah dua kali panen, PAD kurang lebih Rp 60 juta rupiah,” ungkap Yusniah ketika ditemui Baubau post di ruang kerjanya, Selasa, (23/01/2024).

Kata dia, pengembangan budidaya udang vaneme masuk dalam program prioritas dinas perikanan Baubau dan kini Balai Budidaya

Perikanan Kolagana (BBPIK) sementara dalam proses pembibitan.

“Bibit diambil dari Kabupaten Baru, provinsi Sulawesi Selatan. Kemarin itu sebanyak 120 belur, anggarannya sekitar 200 juta dari APBD,” katanya.

Selanjutnya, program prioritas dinas perikanan tahun 2024 diantaranya pengembangan pabrik es, pelatihan pembuat fiber, jaring. Tujuannya agar para nelayan dapat memperbaiki perahu dan jaringan bila rusak.

“Biasanya diberi-

kan bantuan berupa kapal atau perahu jadi, sekarang hanya bahan baku, Nelayan dapat membuat sendiri, kami hanya menyiapkan bahan bakunya, outputnya pelatihan itu.” katanya.

Informasi tambahan, Budidaya udang vaneme dengan sistem bioflok supra intensif ini berhasil dikembangkan oleh Dinas perikanan melalui Balai Budidaya Perikanan Kolagana (BBPIK), di Kelurahan palabusa, kecamatan Lea Lea, Kota Baubau. (*)

Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Segera Lakukan Evaluasi Kinerja OPD

dimana melakukan pendatangannya kinerja itu di awal tahun dan tidak mungkin melakukan penandatanganan kinerja kalau belum melakukan evaluasi.

Menurut Dr Muh Rasman Manafi, evaluasi kinerja dilakukan agar mendapatkan gambaran jaman sampai perjanjian kinerja itu sama dengan yang lalu. Sementara hasil evaluasi itu rendah.

Selanjutnya pihaknya ingin memastikan legitimasi terhadap hasil evaluasi kinerja itu.

Jadi legitimasi ini dilakukan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Dan yang sekarang dilakukan adalah melakukan pembinaan dalam

bentuk peningkatan kapasitas, kemudian pemberian penghargaan, insentif serta lainnya dan yang paling penting yang dilakukan adalah sinkronisasi.

“Dan bisa jadi setelah lakukan evaluasi akan kita dapatkan angka atau target pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh beberapa dinas mengalami tumpang tindih kegiatan. Kegiatan sama persis hanya nomenklatur saja yang berbeda. Ini yang

lakukan sinkronisasi dan siapa yang memiliki tugas sinkronisasi adalah badan perencanaan makanya saya minta kepala Bappeda ya harus hadir disini dan tidak

tempat pertemuan dan Alhamdulillah ini wujudnya hari ini kita bertemu untuk menandatangani NPHD,” jelasnya.

Permohonan maaf juga disampaikan Dr Muh Rasman Manafi, jika dalam pelayanan, dalam penyelenggaraan di Kota Baubau dan juga atas nama wilayah Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan dalam penyelenggaraannya nanti mungkin selama Danrem 143 Halu Oleo ada di wilayah Kepton ada yang kurang tepat sikap, tindak, perkata-

an ataupun perbuatan perilaku.

Danrem 143 Halu Oleo Brgjend Infanteri Ayub Akbar mengucapkan terima kasih atas support dari Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman dalam rangka pengamanan Pilgub dan Pilkada yang nanti akan dilaksanakan. Ini suatu kepercayaan dan penghormatan sehingga pihaknya akan memanfaatkan sebaik-baiknya kepercayaan dana yang diberikan untuk mengamankan dan mensukseskan kegiatan Pemilu dan Pilkada. (*)

Jumat, 26 Januari 2024

Sukseskan Pemilu 2024, Disdukcapil Baubau Tuntaskan Rekam Cetak KTP Elektronik



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Layanan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Baubau tengah menuntaskan rekam cetak KTP elektronik (KTP e) bagi masyarakat yang belum merekam dan memilih pemula yang telah wajib KTP 17 tahun keatas.

Kadis Dukcapil Kota Baubau Drs Arif Basari, M.Si menjelaskan jumlah penduduk Kota Baubau adalah 160.232 orang dan yang wajib KTP 110.392 orang.

Data per tanggal 24 Januari 2024 tercatat yang belum melakukan rekam cetak berjumlah 1.427 orang atau 1,3%. Dari 1427 orang itu terdiri dari kelompok umur umum dan data pemilihan pemula Seko-

lah Menengah Atas (SMA).

Saat ini pihaknya telah menyelesaikan seluruh SMA se Kota Baubau tetapi masih ada yang tersisa untuk data Dapodik sekitar kurang lebih 600 orang, sisanya itu adalah umum.

"Kemarin kami sudah melakukan jemput bola di seluruh SMA, minggu ini kita mulai melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan. Karena ada yang belum melakukan rekam cetak dan kami sudah update by name by address, hari ini baru mulai di satu wilayah Lipu di Kecamatan Betoambari. Data sudah kami kirimkan ke Kelurahan untuk disampaikan kepada masyarakatnya yang belum melakukan rekam cetak dan sudah wajib KTP,"ujarnya.

Saat ini tambah Arif Basari, yang sudah melakukan perekaman dari 110.392 orang sudah mencapai 108.965 orang atau sekitar 98,70% yang sudah melakukan perekaman dan cetak KTP. Dirinya optimis dari 1427 yang belum terekam akan diupayakan bisa mencapai 100% sebelum tanggal 14 Februari 2024 atau hari H pencoblosan Pemilu 2024.

Arif Basari berharap semua berperan aktif dan bekerja bersama khususnya kepada Camat, Lurah dan juga RT/RW agar menyampaikan kepada warganya yang telah masuk batas usia wajib KTP tetapi belum melakukan rekam cetak agar melaporkan kepada di Disdukcapil atau di Kelurahan setempat. (*)

Konflik Harus Diselesaikan dengan Kearifan Lokal Hadapi Pemilu

Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Seluruh Aparat Pemerintah Kota Baubau sudah diperintahkan untuk bersikap netral dalam Pemilu. Jadi harus memahami yang namanya pemilihan pasti ada perbedaan yang memilih A ada yang memilih B dan C.

Disamping itu juga, sebagai aparat sudah diberikan rambu-rambu dalam mengelola wilayah khususnya ASN dan jangan

sampai itu dilanggar. Hal ini perlu diingatkan kembali sampai ke wilayah terkecil, unit-unit terkecil yang dikelola.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si menyampaikan hal itu saat bertemu dengan jajaran ASN lingkup Pemkot Baubau di kantor Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Rabu (24/1/2024).

Dikatakan, semua masalah perbedaan atau bahkan sebuah

konflik, jangan sedikit-sedikit melapor ke polisi. Semestinya diselesaikan dulu dengan kearifan lokal yang dimiliki. Sebab, kalau sudah ada kepolisian terus nanti ada yang di hukum tentunya tidak akan nyaman bagi yang dihukum termasuk pula keluarganya.

Karena itu, tugas sebagai aparat, pemimpin wilayah mengajak tokoh masyarakat. Daerah ini punya banyak nor-

KPU Baubau Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Tahap II



Pewarta: Hengky TA

BAUBAU, BP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara tahap II Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, di halaman Kantor KPU, Rabu (24/01/2024)

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Baubau Farida saat dikonfirmasi mengatakan, berbeda dengan simulasi tahap I yang hanya menggunakan dua jenis surat suara yakni Pemilihan Presiden Wakil Presiden dan DPRD Kota Baubau. Sementara di tahap II ini, langsung menggunakan lima jenis surat suara yaitu Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provin-

si dan DPRD Kota Baubau.

"Tapi kelima surat suara yang akan kita digunakan bukanlah surat asli namun surat suara simulasi. Sama seperti simulasi pertama," jelasnya.

Lanjutnya, peserta yang dilibatkan sebanyak 100 orang, pada simulasi pemungutan dan perhitungan Pemilu tersebut. Kemudian, yang diberi tugas sebagai KPPS adalah PPK dan PPS. Sebab pel-

antikan KPPS baru akan dilantik pada 25 Januari kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek). Selain itu, juga dihadiri partai politik hingga stakeholder pemilu, dan Bawaslu. Kemudian, terdapat beberapa mekanisme yang berubah di Peraturan KPU nomor 25, dimana menggunakan metode Sirekap, sehingga semuanya dilihat menggunakan Apikasi, KPPS 1 dan

KPPS 2 menjadi salah satu akun untuk mengoperasikan Sirekap

Sehingga, nanti tidak lagi ditulis banyak, hanya di C Hasil dan C Hasil Salinan yang nantinya akan dibagikan ke setiap partai politik, jadi sudah berbentuk file melalui Sirekap tersebut, juga dibagikan website resmi dan Media Sosial KPU

"Harapannya, ini jugakan melibatkan anggota KPPS, sehingga dengan simulasi ini kemudian sudah bisa mengaplikasikan pada saat pemilihan 14 Februari kedepan," tutupnya. (*)



ma-norma.

"Buton ini bukan negeri yang baru di bentuk tapi sudah ada ratusan tahun yang lalu, berarti sudah ada nilai-nilai yang bisa mempersatukan kita. Jadi tugas kita menjaga kerukunan di wilayah," katanya.

Menyinggung Pra Musrembang, orang

nomor satu di Kota Baubau ini berkeyakinan di setiap kelurahan itu pasti ada yang prioritas. Bahkan mungkin prioritas itu setiap tahun di ajukan tapi tiap tahun juga di tolak. Oleh sebab itu, pihaknya ingin mendengarkan secara langsung apa yang menjadi prioritas itu.

â€¢ Mungkin ada

yang prioritas menu-rut pak lurah, pak camat atau bapak ibu, ini sudah lama kita tapi kenapa tidak tertangani yang seperti itu yang saya ingin dengarkan. Jadi jangan hal yang baru dipikirkan setelah masuk ruangan ini. Sekali lagi kalau misalnya itu sudah bertahun-tahun ti-

dak tertangani itu yang menjadi prioritas yang perlu kita bicarakan,â€¢ tutupnya.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan yang dilakukan Pj Wali Kota Baubau ke wilayah kelurahan-kelurahan untuk menyerap langsung aspirasi. (**)

<https://www.baubaupost.com>

Jumat, 26 Januari 2024

Pj Wali Kota Jaring Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Nambo



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Pj Wali Kota Kendari, bersama Sekretaris Daerah, Senin (22/1/2024) sore, mengunjungi Kecamatan Nambo untuk menggali informasi dan mendengarkan keluhan masyarakat di wilayah itu.

Dalam kunjungan itu, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengajak sejumlah kepala Organisasi Perangkat daerah, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat dan kelurahan se kecamatan Nambo.

Saat berdialog dengan warga Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup meminta warga untuk menyampaikan keluhannya tentang kondisi di lingkungannya.

“Saya tidak menginginkan cerita-cerita yang baik-baik, saya ingin cerita yang tidak baik, agar pemerintah bisa melakukan intervensi supaya bisa lebih baik,” ungkap Pj Wali Kota Kendari.

Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tenggara ini melihat sangat banyak potensi yang terdapat di Kecamatan Nambo, salah satunya potensi industri pertambangan, pariwisata dan perikanan. Perikanan ini sangat potensi karena dari 6 kelurahan yang ada, 5 di-

antaranya berada di pesisir.

Harusnya dengan potensi itu, masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Namun sayangnya masih terdapat warga yang masuk kategori miskin ekstrim atau belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu masih terdapat 10 kepala keluarga memiliki anak stunting.

Selain itu, Pj Wali Kota Kendari juga mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Salurkan hak pilihnya jangan golput, arahan pemerintah pergi memilih, jaga ketertiban jangan sampai ada keributan-keributan, kita boleh berbeda pilihan tapi jangan sampai bermusuhan,” harapnya.

Sementara itu sejumlah warga Kecamatan Nambo menyampaikan beberapa keluhan mulai dari saluran kali yang dipenuhi sedimen, sehingga setiap hujan datang, kali di sekitar pemukiman warga meluap.

Selanjutnya perbaikan dan pengaspalan jalan warga Kelurahan Nambo untuk menjangkau kebun mereka sepanjang 1,5 km, sebab sudah bertahun-tahun diusulkan dalam

Musrenbang belum juga terealisasi. Kemudian beberapa warga juga kembali mengeluhkan penghentian penambangan pasir di kecamatan itu, warga meminta penerima segera membuka kembali pertambangan itu sebab ribuan warga menggantungkan hidupnya pada usaha itu.

“Kami pak wali mohon difasilitasi sehingga aktivitas ini (pencucian pasir) bisa berlanjut, kalau ada izin yang dibutuhkan bisa dibantu difasilitasi,” ungkap Jurumia.

Menjawab pertanyaan itu Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup meminta masyarakat untuk tetap bersabar karena masih ada proses yang harus dilakukan salah satunya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk pengaspalan jalan, pemerintah Kota Kendari akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pj Wali Kota Kendari juga meminta Bappeda Kota Kendari menyediakan anggaran di perubahan anggaran untuk pembangunan kantor Camat Nambo.

Rencananya, kegiatan serupa akan dilakukan Pj Wali Kota Kendari di 11 kecamatan di Kota Kendari. (*)

Puncak Perayaan HUT ke-193 Kota Kendari Akan Dilaksanakan di Kawasan Eks MTQ



Pewarta: Lisna

KENDARI, BP-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari memimpin rapat rencana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 193 Kota Kendari. Rapat berlangsung di Aula Samaturu Kantor Balai Kota Kendari, Senin (22/1/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si mengatakan, rapat ini akan menyusun pembagian bidang-bidang serta menyusun kegiatan dan lomba yang akan dilaksanakan pada saat HUT Kota Kendari.

“Ada beberapa lomba yang akan dilaksanakan yaitu lomba olahraga, kesenian, budaya, dan kebersihan,

dalam setiap kegiatan lomba sudah ditetapkan penanggung jawab masing-masing dalam kegiatan tersebut untuk memastikan berjalan dengan baik,” jelasnya dalam rapat.

Beberapa lomba disepakati dalam rapat itu untuk mengisi kemeriahan perayaan HUT ke 193 Kota Kendari diantaranya, lomba bola gotong,

lomba lulo, lomba senam lansia, lomba kebersihan lingkungan dan lomba musik bambu. Untuk pelaksanaan perayaan HUT Kota Kendari Sekda mengajak seluruh badan dan instansi untuk saling bekerjasama dan menyukseskan perayaan HUT Kota Kendari tahun ini.

“Saya berharap kita sama-sama menyukseskan kegiatan HUT Kota

Kendari yang ke-193 ini, menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan dalam pelaksanaan HUT Kota Kendari,” harapnya.

Rencananya, perayaan HUT Kota Kendari akan berlangsung selama 4 hari dan kegiatannya akan di selenggarakan di Lapangan Ex MTQ Kota Kendari.

Rapat ini juga dihadiri, Asisten I, II dan III, Staf Ahli, Kepala OPD Lingkup Pemkot Kendari, Kepala bagian, Camat dan lurah se-Kota Kendari. (*)

Pj Wali Kota Kendari Muh Yusup Kembali Tinjau Normalisasi Kali dan Drainase

Pewarta: Amran

KENDARI, BP-Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup kembali turun lapangan memimpin agenda

karya bakti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Selasa (23/1/2024)

Pj Wali Kota

Kendari Muhammad Yusup mengatakan, Alhamdulillah hari ini kita melihat partisipasi dari seluruh komponen masyarakat yang dimotori oleh

Forkopimda. “Bersama seluruh ASN Kota Kendari untuk melakukan aksi bersih-bersih di Kota Kendari, dan Alhamdulillah progresnya kami li-

hat sudah mencapai 50%,” tuturnya.

Selanjutnya, Pj Wali Kota Kendari juga berharap, agar ini terus berlanjut.

“Dan Kota Kendari menjadi Kota

yang bersih, nyaman, dan aman,” harapnya.

Pj Wali Kota Kendari meninjau langsung karya bakti seluruh ASN bersama masyarakat

kat di beberapa titik diantaranya, di Jl.Malik Raya Kelurahan Korumba dan Jl.Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo depan RS.Hati Muli. (*)



Pj. Bupati Buton : Pertumbuhan Ekonomi Buton Cukup Bagus



Pj Bupati Buton La Ode Mustari

Pewartu: Rahman

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton mencapai 5.78%. Dan angka itu bagus.

“Namun kita harapkan peningkatan khususnya DAK dan DAU sedapat mungkin ada perjanjian kontrak tenaga kerja tidak bisa mengambil dari luar khususnya untuk Fisik,” demikian dikatakan Pj. Bupati Buton pada giat Sosialisasi dan Koordinasi

dalam rangka Penyaluran Transfer Kedaerah Tahun anggaran 2024 bertempat di Aula Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa Rabu Sore, 24 Januari 2024

Kepala KPPN Kota Baubau, Hariyanto, S.E., LL.M menyampaikan sosialisasi tersebut merupakan salah satu usaha peningkatan kualitas pengelolaan dan penyaluran Transfer ke Daerah, sebagai sarana penguatan koordinasi dan sinergi serta

untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan yang dihadapi rekan Pemerintah.

“Melalui kesempatan ini ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan waktu untuk berkoordinasi” ungkapnya

Melalui rapat koordinasi antara KPPN Kota Baubau dengan BPKAD dan DPMD Kabupaten Buton ini diharapkan penyaluran Transfer ke Daerah dapat berjalan dengan lancar. (*)

Tim Badan Keahlian Komisi II DPR RI Kunker di Kabupaten Buton



Pewartu: Rahman

BUTON, BP-Tim Badan Keahlian Komisi II DPRD RI melakukan kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Buton dalam rangka persiapan rancangan undang-undang Kabupaten Buton bertempat di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa 23 Januari 2024.

Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Buton, Ny. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, S.H., M.H, Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen.,SH.,S.I.K.,M.I.Kom, Kepala Pengadilan Negeri Pasarwajo, Ivan Budi Hartanto, SH,MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi, Asisten Staf Ahli, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Buton, Para Kepala Desa, serta Lurah hingga RT/RW di wilayah Kabupaten Buton.

Kunker dipimpin Yudarana Sukarno Putra S.H.,LL.M sebagai Perancang Perundang-undangan madya, Apriyani Dewi Aziz S.H Perancang Perundang-undangan Muda, Tommy Cahya Trinanda S.H., LL.M sebagai Perancang undang-undangan pertama, M. Nurfaik S.H.I Perancang Undang-undangan muda, Crinstina Devi Natalia S.H, M.H perancang undang-undangan muda, Debora Sanur Lindawati S.Sos., M.Si sebagai Analis Legislatif, Anggia Michel sebagai tenaga ahli komisi II.

Badan Keahlian DPR RI Yudarana Sukarno Putra S.H.,LL.M menyampaikan Badan Keahlian DPR RI memberikan support di bidang keahlian kepada DPR RI.

“Kami disini mendapat tugas dari komisi 2 DPR RI untuk memperbaiki atau mengupdate pembentukan kabupaten-kabupaten di daerah yang dasar hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan UUD 1945,” katanya.

Jadi setelah diinventaris lanjut Yudarana banyak sekali pembentukan daerah provinsi atau kabupaten yang masih menggunakan dasar hukum

lama yang sudah tidak sesuai lagi sehingga pihaknya mendapatkan penugasan dari komisi II untuk membuat naskah akademik dan draf RUU yang untuk kemudian diserahkan kepada komisi II DPR RI yang selanjutnya akan melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Sementara itu, Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari M.Si menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2021 pemerintah Indonesia akan merencanakan revisi undang-undang tentang pembentukan provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sepaham saya ada 20 provinsi yang undang-undang pembentukannya di revisi dan ada 271 Kabupaten/Kota dan Alhamdulillah provinsi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan undang-undangnya pada tahun 2022,” Kata Pj. Bupati Buton.

Pemerintah Kabupaten Buton mengucapkan terima kasih kepada Tim Badan Keahlian DPR RI berkunjung ke Kabupaten Buton berupaya untuk merevisi undang-undang Kabupaten Buton.

Pj. Bupati Buton mengharapkan kepada sekretaris daerah Kabupaten Buton untuk memfasilitasi kedatangan tim badan keahlian

DPR RI untuk mencari data dan mengumpulkan aspirasi masyarakat maupun ide-ide dalam rangka persiapan rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan baru.

Oleh karena itu, Pj. Bupati Buton memberikan saran dalam pengumpulan data untuk pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada pemberian uraian atau Historis Kabupaten Buton yang bermula dari sistem kerajaan, kesultanan, kemudian kemerdekaan, hingga masuk sampai otonomi daerah dan juga adanya saran-saran dari para tokoh masyarakat adat di Kabupaten Buton.

Pj Bupati Buton menyampaikan bahwa seluruh kerajaan maupun kesultanan di Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur, tinggal Kesultanan Buton ini belum mekar menjadi sebuah Daerah Provinsi. Karena itu ini yang menjadi perhatian masyarakat Buton agar memberikan saran kepada komisi II terutama tentang pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. (*)

KPU Buton Gelar Simulasi Pemungutan Suara



Pewartu: Rahman

BUTON, BP-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton melaksanakan simulasi lanjutan pemungutan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Kegiatan simulasi ini merupakan simulasi lanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor KPU dan simulasi lanjutan kali ini berlangsung di Lapangan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo,

Kabupaten Buton, Rabu 24 Januari 2024.

Dalam simulasi lanjutan ini pelaksanaannya sama saat dilakukan simulasi pertama dengan menggunakan lima kertas suara yakni kertas suara pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Panitia PPS juga memperkenalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang akan menjadi bagian integral yang merupakan

sebuah inovasi digital terbaru yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia untuk penyelenggara Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

Dalam simulasi bertujuan untuk memastikan kesediaan petugas pemungutan suara dan penghitungan suara

dalam menggunakan teknologi baru tersebut.

Dalam simulasi lanjutan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU

Kabupaten Buton, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton, Anggota Forkompinda Kabupaten Buton, Kasat Pol PP,

Camat Pasarwajo dan para penyelenggara PPK dan PPS Se-kabupaten Buton. (*)

Pengurus IGTK-PGRI Buton Dikukuhkan



Laporan: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd. M.Si. mewakili Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri dan menyaksikan Pelantikan dan mengukuhkan pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten Buton masa bakti 2023-2028. Giat yang mengusung tema “bersatu memantapkan soliditas dan solidaritas organisasi yang kuat dan bermartabat dalam menyongsong revolusi 5.0 melalui pemberdayaan guru TK yang berkarakter dan profesional”, dilaksanakan di Aula Rujab Bupati Buton, Selasa, 23 Januari 2024.

Turut hadir Bunda PAUD Kabupaten Buton yang juga ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati, Ketua Pokja PAUD yang juga Ketua Dharma Wanita Kabupaten Buton, Ny. Kiki Amalia Asnawi, Plt. Kadis Pendidikan Kabupaten Buton, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Camat Lasalimu Selatan, para Ketua GTKI Kab. Buton, Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah dan Bunda Paud se-Kab. Buton.

Sekda Buton mengucapkan Selamat kepada IGTKI Buton yang baru saja dilantik. “Hari ini IGTKI Kab. Buton sudah dilantik yang sebelumnya sempat fakum itu berarti sudah ada tambahan tugas bagi ibu-ibu guru, bukan hanya mengajar dan mendidik muridnya tetapi

ada tambahan baru yaitu bagaimana organisasi ini bisa berjalan baik dan bisa bersaing dengan IGTKI di kabupaten lain,” ungkapnya.

Jenderal ASN Buton ini juga menyinggung masalah revolusi 5.0 dalam dunia pendidikan yang tidak terlepas dari masalah digitalisasi.

“Dalam menghadapi revolusi 5.0 ini guru lebih berfungsi sebagai fasilitator dan mentor yang membantu siswa mengembangkannya keterampilan, kreatifitas dan kolaborasi,” katanya.

Mengakhiri sambutannya Sekda Buton meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi perhatian soal masa depan guru-guru TK yang masih berstatus Swasta yang tidak bisa ikut seleksi ASN.

“Semoga bisa menjadi perhatian Dinas Pendidikan bagi guru-guru yang mengajar di swasta tidak bisa ikut seleksi semoga ada solusi untuk bagaimana TK yang belum berstatus Negeri segera di negerikan” pungkasnya.

Sementara itu ketua IGTKI Sultra, Dra. Dra. Samsin Haviluddin, M. Pd, usai melantik dan mengukuhkan pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten Buton masa bakti 2023-2028 menyampaikan untuk menitikberatkan pada kegiatan guru TK dan PAUD sebagai pendidik, penyayang, sabar, serta mampu bersaing di dunia digital.

“Harapan Pemerintah Daerah agar guru menjadi suri tauladan bagi siswanya dan mencetak generasi yang kompeten sehingga menjadi generasi harapan bangsa,” kata Ketua IGTKI Sultra. (*)

Pemkab Buton Teken Kerja Sama dengan Poltekkes Kemenkes Kendari



Laporan: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kendari melakukan penandatanganan kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Rabu, 24 Januari 2024, di Poltekkes Kemenkes Kendari Prodi Buton di Psarwajo.

Penandatanganan kerja sama tersebut diteken langsung Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. dan Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari, Teguh Faturrahman, S.K.M., MPPM.

Pj. Bupati Buton pada kesempatan itu mengappresiasi penantangan Kerjasama tersebut karena dalam urusan-urusan pemerintahan, tugas pejabat itu ada tiga komponen yang dijalankan salah satunya urusan kesehatan.

“Yang pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat Itu yang menjadi tugas utama yang diperlukan harus menjadi perhatian pejabat dimana-

berada,” ujarnya.

Kepala Daerah di Bumi Penghasil Aspal Alam terbesar di dunia itu juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur dan berharap kerja sama tersebut bisa terus berlanjut dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Buton.

“Saya sudah perintahkan bahwa untuk hibah tanah dalam rangka pembangunan rusunawa itu saya kira harus segera diselesaikan. Karena memang dasar Pak Direktur harus ada untuk pembangunan gedung tersebut,” jelasnya.

Ditektur Poltekkes Kemenkes Kendari sangat mengapresiasi Pemerintah Kabu-

paten Buton ter-khusus kepada Pj. Bupati Buton karena mau berkomitmen kerja sama mengembangkan SDM Kesehatan.

Dikatakannya, sebenarnya Prodi Buton akan dapat bantuan pembangunan Rusunawa untuk mahasiswa setinggi lima lantai dari Kementerian Kesehatan namun karena ada masalah administrasi sehingga ditunda.

“Seharusnya bulan April ini perletakan batu pertama, namun karena satu dan lain hal belum bisa terlaksana.

Selanjutnya Direktur mengucapkan terima kasih atas atensi para pimpinan di Kabupaten Buton khususnya Pak Bupati yang tetap

memberikan alokasi anggaran beasiswa untuk anak-anak Kabupaten Buton.

“Atas kehadiran pada acara ini menjadi teruskan komunikasi yang bagus antara kami dan Pemkab Buton untuk membangun secara bersama-sama bersinergi khususnya dalam bidang kesehatan.” tutupnya.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pendidikan dari Pemkab Buton kepada 30 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Prodi Keperawatan Buton.

Turut hadir mendampingi Pj. Bupati Buton Sekretaris Daerah Kab. Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. para kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Puskemas, dan Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Kendari. (*)

Jaksa Agung Minta Jajaran Jaga Penampilan, Larang Tato hingga Jenggot



Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh jajarannya menjaga sikap dan penampilan. Dia mengatakan jaksa tidak boleh bertato dan berjenggot

Laporan: Hamid

JAKARTA-- Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh jajarannya menjaga sikap dan penampilan. Dia mengatakan jaksa tidak boleh bertato dan berjenggot.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam instruksinya berkaitan dengan kode etik perilaku Jaksa.

"Menjadi seorang Jaksa tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan, sejak mereka lulus dan dilantik menjadi seorang Jaksa pun sudah dibekali dengan Kode Perilaku Jaksa seperti tidak boleh bertato, tidak boleh berjenggot, tidak boleh bertindik sembarangan, tidak memakai pewarna

rambut yang dilarang," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (22/1). Jaksa Agung memerintahkan seluruh anggota mengenakan pakaian yang sesuai dengan Seragam Jaksa (Gamjak). Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan jaksa dengan APH lainnya.

Burhanuddin juga memerintahkan agar tidak ada lagi anggota yang turut memamerkan harta kekayaan atau flexing di media sosial. Selain itu, ia melarang jajarannya mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merugikan institusi, seperti tempat hiburan malam.

Jaksa Agung mengingatkan dalam era digital saat ini selu-

ruh perilaku dan tindakan akan disorot oleh publik.

Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh jajarannya menjadi contoh dan teladan di masyarakat bahkan di jajaran aparat penegak hukum (APH) lainnya.

"Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah good character, sehingga sebagai penegak hukum yang humanis adalah cerminan," ucap Jaksa Agung.

"Tidak ada larangan bermain media sosial yang bisa memperkenalkan Jaksa Humanis dan kinerja Kejaksaan di mata masyarakat. Jadilah Jaksa yang dicintai dan dipercaya masyarakat dalam segala hal," sambungnya. (*)

KPK: Pungli di Rutan KPK Sangat Terstruktur, 191 Orang Diklarifikasi

Pewartanya: Alwan

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan korupsi berupa pungli di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sangat terstruktur.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan sudah terjadi lama.

"Saya ingin sampaikan ini sangat terstruktur karena ada yang bertindak sebagai lurahnya, koordinator di masing-masing hunian, kemudian ada

pengepulnya, rekening-rekening yang digunakan bukan rekening dari orang-orang yang ada di Rutan Cabang KPK. Rekening di luar," ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/1).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyampaikan KPK ingin menyelesaikan sendiri kasus tersebut mulai dari etik, pidana, hingga disiplin pegawai yang diduga terlibat.

Selain itu, terang Ali, KPK juga akan memperbaiki tata kelola Rutan melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma-

nusia (Kemenkumham).

Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

"Sekali lagi ke depannya tentu akan menjadi evaluasi termasuk tata kelola Rutan akan dilakukan perbaikan. Kami sadar betul ketika terjadi fraud atau kecurangan, ini pasti ada kelemahan sistem. Oleh karena itu, perbaikan sistem itu jadi fokus kami ke depan," ucap Ali.

Ali menyampaikan tim penyelidikan KPK telah meminta keterangan 191 orang

Siskaece Ditahan di Rutan Polda Metro Terkait Kasus Film Porno



Selebgram Siskaece ditahan selama 20 hari ke depan terkait film porno.

Laporan: Hadi

YOGYAKARTA -- Polisi resmi melakukan penahanan terhadap selebgram yang dikenal dengan nama Siskaece selaku tersangka kasus produksi film porno.

Direktur Reskrim-sus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Siskaece ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Metro Jaya. "Setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Siskaece tadi malam, terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya," kata Ade Safri saat dikonfirmasi, Kamis (25/1).

Ade Safri menerangkan penyidik memutuskan untuk menahan Siskaece karena dianggap telah menghambat proses penyidikan. Apalagi, Siskaece tercatat sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

"Upaya penahanan akan dilakukan oleh penyidik dengan per-

timbangan kebutuhan dan kepentingan penyidikan, karena yang bersangkutan (Siskaece) sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik, dan ini jelas menghambat proses sidik yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik dalam penanganan perkara a quo," tuturnya.

Dari 11 pemeran yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya Siskaece yang akhirnya dijebloskan ke tahanan. Sementara 10 tersangka lainnya hanya dikenakan wajib lapor usai diperiksa beberapa waktu lalu.

"Tersangka lainnya kooperatif selama dalam proses penyidikan atau pemeriksaan atau permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para tersangka," ucap Ade

Safri.

Polisi sebelumnya telah melakukan upaya penjemputan paksa atau penangkapan terhadap Siskaece yang merupakan tersangka kasus produksi film. Ia ditangkap di sebuah apartemen di daerah Sleman, DIY, Rabu (24/1).

Penangkapan Siskaece dilakukan lantaran yang bersangkutan sudah dua kali mangkir dari agenda pemeriksaan sebagai tersangka.

"Telah dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FCN alias Siskaece oleh tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara a quo," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keteran-

gannya.

Dalam kasus ini, Siskaece ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 pemeran lainnya. Mereka dijerat Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Di sisi lain, Siskaece telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas status tersangka yang disandangnya pada Senin (15/1) lalu.

Permohonan tersebut telah teregister dengan nomor perkara: 7/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Permohonan dalam gugatan ini adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Sidang perdana gugatan praperadilan Siskaece dijadwalkan pada Senin (22/1) lalu. Namun, sidang ditunda hingga pekan depan lantaran Polda Metro Jaya tak hadir dalam persidangan. (*)

terkait kasus dugaan pungli di Rutan.

Mereka yang diperiksa terdiri dari 45 orang yang merupakan mantan tahanan dan atau narapidana kasus korupsi, penjaga Rutan hingga pihak swasta.

"Kemarin kami sampaikan 190 (orang), tapi 12 Januari lalu sudah bertambah satu orang yang kami lakukan pemeriksaan, sekitar 191 orang saat ini dan sudah dua orang ahli hukum untuk menentukan bahwa ini adalah kewenan-

gan KPK dalam proses penyelidikan dan juga nanti penyidikan," kata Ali.

Ia menyampaikan para pihak yang mengetahui kasus dugaan pungli di Rutan Cabang KPK saat ini sedang berada di sejumlah daerah di Indonesia. Para penyidik, lanjut Ali, bahkan harus melakukan pemeriksaan di Kalimantan Timur.

"Kami ingin tunstasikan sendiri. Dari sisi etikanya, pidananya, dan disiplin pegawainya," tegas dia.

Saat ini, sebanyak 93 pegawai KPK tengah menjalani sidang kode etik dan pedoman perilaku di Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pungli di Rutan.

Dewas akan menggelar pembacaan putusan etik untuk 90 pegawai KPK pada Kamis, 15 Februari 2023. Sementara putusan untuk tiga terduga lainnya belum diatur.

Nilai pungli di Rutan Cabang KPK yang ditemukan Dewas mencapai Rp6,14 miliar. To-

tal itu merupakan akumulasi sejak Desember 2021-Maret 2022.

Setiap pegawai KPK menerima besaran yang bervariasi, dari mulai Rp1 juta hingga Rp500 juta.

Modus yang digunakan di antaranya memasukkan handphone ke dalam rutan dan mengisi daya baterai. Ada biaya Rp10-Rp20 juta untuk memasukkan handphone ke Rutan, sementara mengisi daya baterai handphone dibanderol Rp200-Rp300 ribu. (*)

Pj Wali Kota Dr Muh Rasman Manafi Sampaikan Peran Penting Baubau di Masa Transisi Ke Danrem 143 Halu Oleo



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Kota Baubau merupakan tempat berkumpulnya orang sejak dulu menjadi sebagai ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, ibu kota Kabupaten Buton ibu kotanya ada di Baubau. Oleh sebab itu, pada masa transisi yang dihadapi bersama seperti sekarang ini, Kota Baubau menjadi sangat penting perannya sebab selain sebagai tempat berkumpul, tentu inbauannya akan sampai kemana-mana. Sehingga, apa yang dibicarakan di Kota Baubau akan sampai di Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah bahkan sampai ke Buton Utara.

Demikian di-

katakan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat makan malam bersama Danrem 143 Halu Oleo Brigjend Infanteri Ayub Akbar Selasa malam (23/1/2024).

Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si juga menyampaikan kasih atas kunjungan Danrem 143 Halu Oleo Brigjend Infanteri Ayub Akbar ditengah kepadatan jadwal, masih menyempatkan waktu untuk melakukan kunjungan ke Kota Baubau. Karena itu, Pemkot Baubau mempunyai kewajiban sesungguhnya untuk menyambut kedatangan Danrem 143 Halu Oleo Brigjend Infanteri Ayub Akbar sebagaimana layaknya

adat dan tradisi yang ada di timur Indonesia.

Saat ini di Kota Baubau ungkap Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman, tali silaturahmi antara Pemerintah Kota Baubau dengan TNI, POLRI, FORKOPIMDA itu telah terjalin dengan baik dan sudah menjadi kewajiban yang selalu dirawat. "Sehingga, pada kesempatan ini, jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam menerima tingkah laku, perilaku, pernyataan, atas nama Pemerintah Kota Baubau mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat datang di Kota Baubau negeri Khalifatul Khamis," ungkap (*).

Pasar Wameo Baubau Harus Bebas Sampah dan Semrawut

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memberikan layanan kepada masyarakat dan salah satu bentuknya adalah penataan pasar wameo.

Namun demikian, diminta pengelolannya diupayakan baik serta dapat dimanfaatkan oleh pedagang dan masyarakat.

Demikian dikatakan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat melakukan haroa atau doa bersama di pasar wameo Rabu (24/1/2024).

Menurut Dr Muh Rasman, dengan mengadakan haroa

diharapkan barokah menjadi modal menjalani hidup didunia. Karena itu, kepada yang mengelola pasar dan yang menempati tempat agar sekaligus juga mengelola bangunan termasuk lingkungan yang baik agar menjadi barokah.

"Jadi apa pun modelnya kita jaga wilayah, kita sehatkan karena dimanmana di wilayah pasar hanya ada dua masalahnya semrawut dan sampah. Jadi saya minta ini tidak terjadi di pasar kita," tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini menambahkan, dalam hal pengelolaan pasar maka

yang dikedepankan adalah toleransi terhadap lingkungan terutama terhadap pedagang dan pengunjung yang datang ke pasar. Diakui, masing-masing orang memiliki aktifitas, memiliki latar belakang sehingga jangan dipaksakan keinginan sendiri untuk diikuti oleh orang lain.

Oleh sebab itu, agar pasar dikelola dengan baik maka ada pengelola pasarnya yang spesifik dan menjadi contoh dalam mengelola. Jangan semena-mena, jangan mengatur sesuai dengan keinginannya saja. Bicarakan dengan pedagang dan ma-

Pemkot Baubau Ingin Percepat Hapus Kemiskinan Ekstrem di Angka Nol



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau ingin melakukan langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah ini diharapkan semua OPD mencari cara agar target di 2024 itu di angka 0. Setiap OPD harus punya strategi yang berbasis data.

Demikian dikatakan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat rapat percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Selasa (23/1/2024).

Menurut Dr Muh Rasman, datanya itu harus satu sehingga bisa memvalidasi, OPD mana yang sudah mengintervensi kemudian apa yang terjadi setelah ada intervensi itu. Dan yang mengawal intervensi adalah ke-

pala wilayah dalam hal ini Camat dan Lurah.

"Bahwa intervensi sudah ada, intervensinya seperti apa. Misalnya OPD sudah turun, instansi vertikal sudah turun tetapi update informasinya kepala wilayah tidak tahu. Jangan juga berpikir saya tidak pernah diberi tahu. Jangan tunggu diberi tahu, bapak-bapak yang bergerak. Kalau misalnya kegiatannya tidak tahu bisa lewat asisten I, pro-

gram untuk wilayah ini apa saja. Itu semua bisa didapat, tidak ada yang rahasia,ujarnya"

Ditambahkan, pada program sebelumnya yang pernah disampaikan oleh Gubernur Sultra dan itu juga sudah dilanjutkan ke OPD bahwa salah satu program yang menjadi prioritas Gubernur Sultra terkait pemetaan desa presisi. Dan yang namanya program pemetaan dan pendataan itu sesungguhnya bukan tidak punya data

tetapi yang diinginkan memvalidasi data Pemkot Baubau.

Validasi itu kroscek data yang dimiliki dengan informasi yang terbaru dan itu yang akan dilakukan serta aksinya itu dilakukan secara tepat sasaran bukan hanya sekedar datang ke wilayah tapi langsung ke sasaran untuk verifikasi datanya.

Lebih lanjut dijelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan program prioritas Pemkot Baubau. Walaupun masih di angka 0,93% penduduk miskin tapi dari sisi jumlah masih tetap meningkat. Di tahun 2023 angkanya mencapai 7,53% sebelumnya di 7,31% di tahun 2022. (*)



sarakat kemudian baru melaksanakan sama-sama. Jadi apabila itu dilaksanakan dan tidak ada yang

memaksakan kehendak maka semua akan berjalan dengan baik.

"Saya mengapr-

esiasi dan menghormati, ini tentu bentuk yang selalu saya sampaikan bekerja bersama, meski-

pun kecil-kecil yang penting kita selalu sama-sama," ungkap (*).